

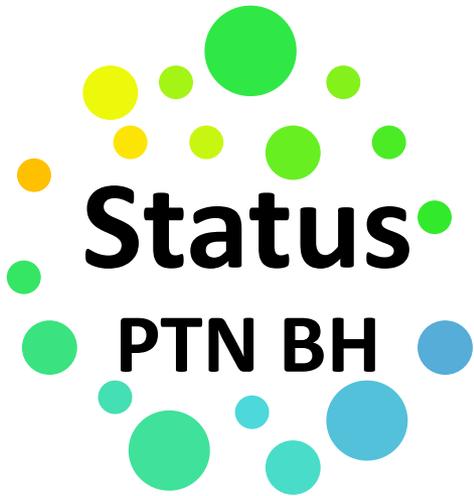
Perlakuan Perpajakan di IPB PTN BH

**Disampaikan pada acara *Launching*
Tax Education dan Research Center
(TERC)**

**Indah Yuliasih
Direktur Keuangan dan Akuntansi IPB**

Perubahan Status IPB





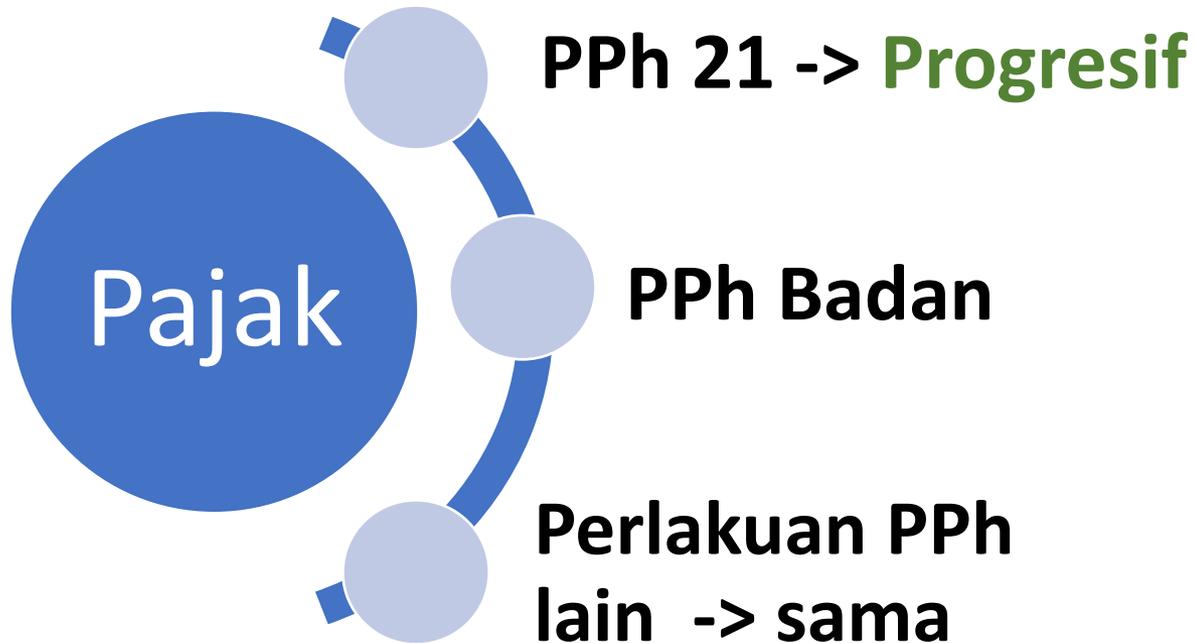
Status

PTN BH



NPWP

PKP



Mei 2017

NPWP IPB

60 NPWP + 1 PKP (PN)

Bendaharawan

PKP (Induk)

PKP Non Faktur

00.002.658.3-434.000

02.269.140.6-434.000

02.269.140.6-434.004

Institut Pertanian Bogor
(Bendaharawan)

IPB PTN BH (PKP)

IPB PTN BH (PKP)

Dana :

1. DIPA : Gaji, UM, Tunjangan
2. BPPTN Badan Hukum

Dana :

1. Kerjasama
2. Jasa Pelayanan dan penyewaan kpd pihak luar
3. Penyerahan Barang / Jasa
4. Beasiswa (Bukan Objek Pajak)

Dana :

1. SPP (DM IPB, DM SPPA)

NPWP Bendahara Pemerintah

APBN
(Gaji PNS)
Sekretariat Jendral
Kemenristekdikti

1. NPWP Bendahara
Pemerintah
2. Melaporkan SPT Masa
– PPh Pasal 21

NPWP PKP

NON APBN
(DANA MASYARAKAT)

1. NPWP Badan Hukum
2. Kewajiban pajak :
 - * Memotong/Melaporkan :
 - PPh Pasal 21/26,
 - PPh Pasal 23/26,
 - PPh Pasal 4 ayat (2)
3. PPN
 - Menerbitkan/menerima
Faktur Pajak
 - Melaporkan SPT Masa
PPN

Perlakuan PPh 21 atas Gaji, Upah, Honor PNS dan Non-PNS PTN-BH

SUMBER APBN

GAJI &
TUNJANGAN

PPH
DITANGGUNG
PEMERINTAH
(DTP)

LAMPIRAN
SPT PPH 21
FORM A2

TUNJANGAN SERTIFIKASI DOSEN, UANG
MAKAN, TUNJANGAN KEHORMATAN
PROFESOR, TUNJANGAN JABATAN
STRUKTURAL

PPH FINAL MENURUT GOLONGAN
(5% ATAU 15%)

BUKTI
POTONG
FINAL

PNS

SPT OP "KB"

SUMBER NON-APBN

INSENTIF KINERJA WAJIB, INSENTIF KINERJA
KELEBIHAN, INSENTIF PERBAIKAN PENGHASILAN,
TUNJANGAN PENELITIAN, UANG MAKAN UNTUK
NON-PNS, INSENTIF JABATAN

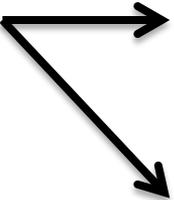
TARIF PROGRESSIF PPH PASAL 17 ORANG PRIBADI
(5%, 15%, 25%, 30%) TERGANTUNG JUMLAH
AKUMULASI PENGHASILAN SELAMA 1 TAHUN)

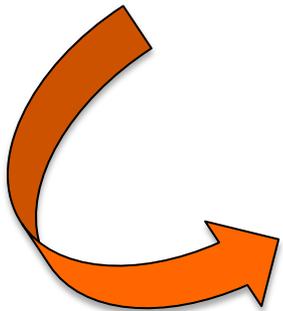
LAMPIRAN
SPT PPH 21
FORM A1

Non PNS

SPT OP "N"

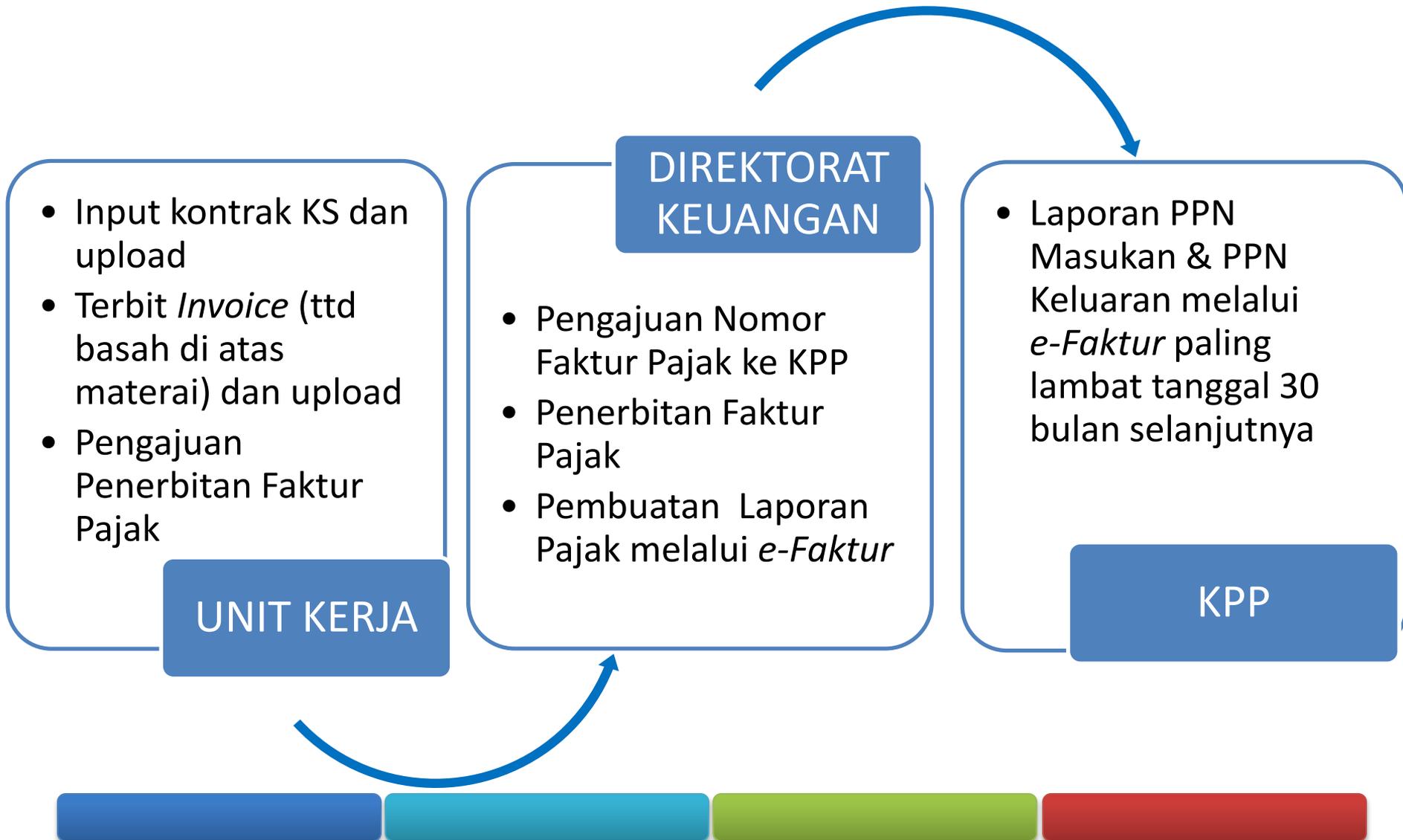
Perlakuan PPh 21

- Perhitungan Pajak Progresif  Lebih Bayar
Kurang Bayar
- Pengembangan sistem PPh 21 yang bisa memantau pengenaan pajak

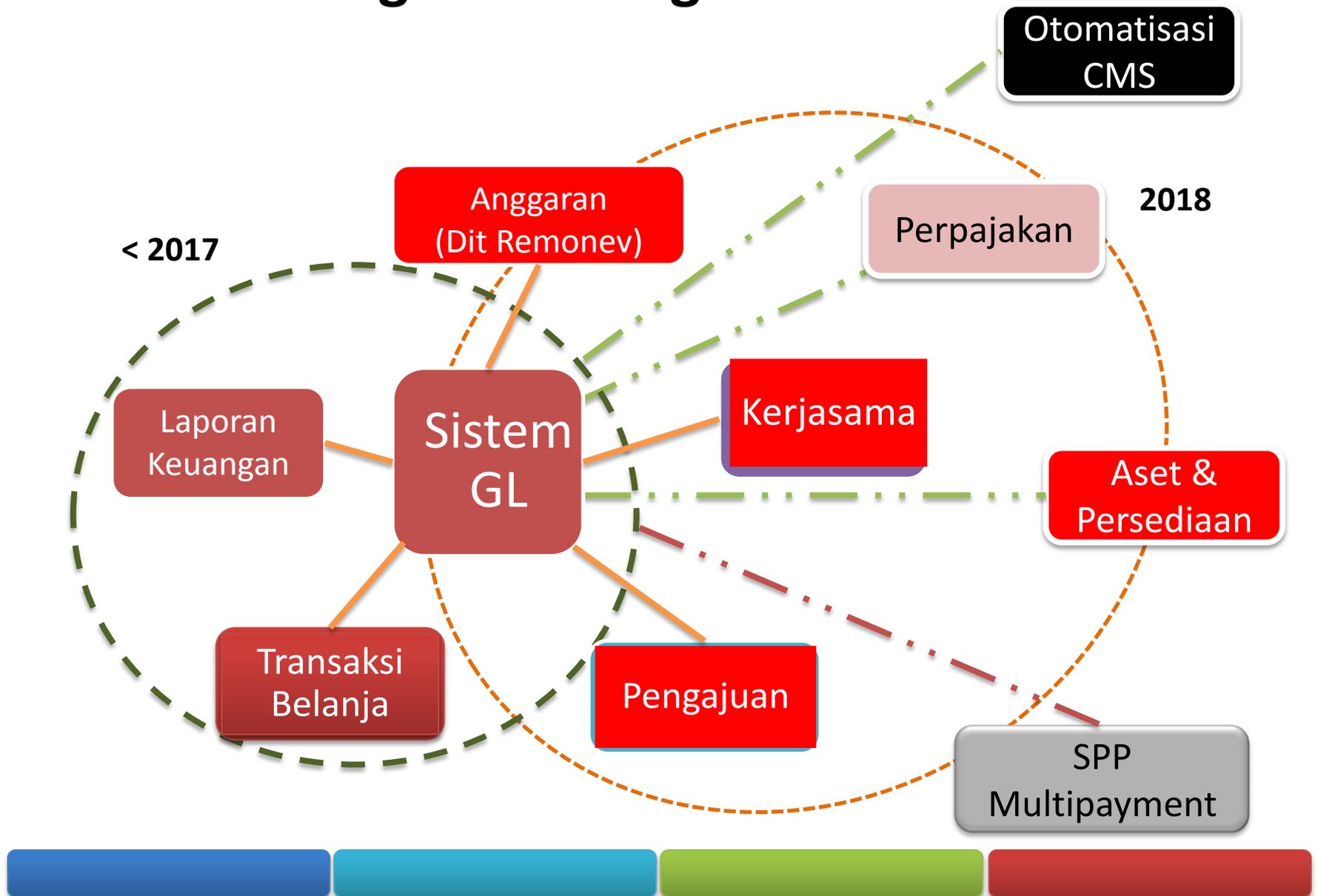


- PPh 21 tidak final
- Bukti potong tiap bulan, yang dapat dicetak di setiap unit

MEKANISME PENERBITAN FAKTUR PAJAK-PENERIMAAN



Sistem Keuangan Terintegrasi



Sistem saat ini :

Pengembangan Sistem :



CMS – Bank Mitra

Sistem Keuangan Terintegrasi



PENDAPATAN
KERJASAMA

Menu yang disediakan untuk mencatat kontrak kerjasama dan penerbitan faktur



ANGGARAN

Menu yang disediakan untuk mencatat Alokasi Pagu RKA dan TOR kegiatan



PENGAJUAN

Menu yang disediakan untuk pengajuan dana



GENERAL
LEDGER

Menu yang disediakan untuk mencatat bukti pertanggungjawaban dan pencatatan aset

Kendala

- Lokasi Wajib Pajak yang berbeda KPP (Kota dan Kabupaten Bogor)
- Mitra kementerian masih menganggap PTN BH sebagai bendahara pemerintah (tidak memperhitungkan PPN, meminta potongan PPh 22, dan PPh 21 final)
- Kerjasama diklat/pelatihan/seminar apakah dpt dikategorikan sebagai kerjasama pendidikan yang tak dikenakan PPN?
- IPB memberlakukan pajak digunggung untuk layanan langsung yg transaksinya kecil-kecil di unit

Kendala

- Jasa LN (e-journal, e-book, e-commerce) apakah dapat diberi insentif tak dikenakan PPh 26?
- Penerimaan hibah LN untuk konsorsium PT, bagaimana perpajakannya saat memindahbukukan ke PT anggota (Satker/BLU)?
- Perpajakan hibah dari perseorangan ke PTN BH?
- Perpajakan penyerahan barang dari PTN BH ke negara?
- Perpajakan deviden yang diterima PTN BH?
- Produk hasil usaha PTN BH perijinan terkendala karena PTNBH sebagai WP yang tidak dikenal

TERIMA KASIH

